

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Mei 2024 inflasi *year on year* (y-on-y) Kabupaten Sumbawa sebesar 2,19 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,27. Berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa, 3 Juni 2024. Angka inflasi Kabupaten Sumbawa Bulan Mei 2024 menjadi angka inflasi terendah jika dikomparasikan dengan angka inflasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

Karena angka inflasi memiliki polarisasi minimize, maka capaian ini tentu menjadi gambaran sangat baik sebagai kinerja ekonomi makro daerah dalam hal stabilisasi harga dan TPID Kabupaten Sumbawa sebagai instrumen pengendali inflasi memiliki peran yang sangat sentral dalam menjaga fluktuasi harga.

Tingkat inflasi 2,19 pada Mei 2024 merupakan inflasi *year on year* (y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,27, dimana pada periode yang sama Mei 2023 dengan IHK 103,99 pada Mei 2023. Sedangkan perkembangan *month to month* (m-to-m) sebagai perkembangan dari periode bulan lalu (April 2024) mengalami deflasi sebesar 1,13 persen. Begitu juga perkembangan *year to date* (y-to-d) sebagai kumulatif dari 1 Januari - 31 Mei 2024 ini mengalami deflasi sebesar 0,61 persen.

Berdasarkan BRS BPS Kabupaten Sumbawa, inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,74 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,4 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,85 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,28 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,78 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,89 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,93 persen. Sedangkan untuk kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan. Pada periode Mei 2024, terdapat deflasi dimana tingkat deflasi *month to month* (m-to-m) sebesar 1,13 persen dan tingkat deflasi *year to date* (y-to-d) sebesar 0,61 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Mei 2024, antara lain: emas perhiasan, sigaret kretek mesin (SKM), beras, telur ayam ras, cabai merah, sigaret kretek tangan (SKT), tomat, ikan teri, gula pasir, bawang merah, sigaret putih mesin (SPM), anggur, kacang panjang, cumi-cumi, ikan bandeng/ikan bolu, sabun detergen bubuk, terong, ayam hidup, seragam sekolah anak dan jeruk. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: ikan layang/ikan benggol, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, daging sapi, udang basah, bayam, daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, tauge/kecambah, kangkung, bensin, celana panjang jeans pria, asam, kelapa, mie kering instant, semen kol putih/kubis, susu kental manis, pisang, jeruk nipis/limau. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Mei 2024, antara lain: tomat, ikan layang/ikan benggol, beras, udang basah, cumi-cumi, ikan bandeng/ikan bolu, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, cabai rawit, batu bata/batu tela, cabai merah, tempe, jeruk nipis/limau, daging ayam ras.

Selanjutnya, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,58 persen; kelompok perawatan

pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,32 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,17 persen; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok pendidikan tidak memberikan andil terhadap inflasi y-on-y Bulan Mei 2024.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2024 masih menghadapi tantangan klasik dan penyebab lainnya, yaitu:

1. Perekonomian Kabupaten Sumbawa bertumpu pada sektor agraria, menyebabkan produktifitas sektor pertanian sangat besar kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Kondisi pemasaran, distribusi dan perkembangan harga bahan pokok hasil pertanian menjadi masalah setiap tahunnya akan terus berulang dan menjadi perhatian pemerintah. Pada awal triwulan II harga beras mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan berlangsung lama sehingga berpengaruh signifikan terhadap sumbangan inflasi Kabupaten Sumbawa.
2. Dalam rangka pengadaan beras maka pelayanan pemerintah khususnya Bulog khususnya peralatan pendukung belum menggunakan teknologi yang modern dan meminimalisir penggunaan SDM mengingat keterbatasan pekerjaan oleh SDM. Alat penimbangan yang modern dan layak untuk mengurangi penggunaan SDM yang terbatas. Alat untuk mengecek kadar air yang saat ini masih memerlukan waktu lama yang mengakibatkan waktu menunggu truk lebih lama (1 sampai 2 hari) menginap di gudang Bulog sehingga menyebabkan tambahan biaya bagi pengusaha.
3. Untuk bidang perhubungan belum ada kebijakan pemerintah daerah yang mempengaruhi transportasi/distribusi bahan pangan secara langsung, yang ada hanya pengaturan distribusi dalam kota. Jalur dan rantai distribusi komoditi *volatile food* yang masih didatangkan dari luar daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rapat Koordinasi Pengawasan Minimarket Berjejaring Nasional Di Kabupaten Sumbawa.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Sumbawa terkait Minimarket Berjejaring Nasional (Alfamart dan Indomaret)

Pihak Pemerintah Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah melakukan koordinasi terkait dengan Minimarket Berjejaring Nasional (Alfamart dan Indomaret).

a. Rapat Koordinasi Pengawasan Minimarket Berjejaring Nasional pada tanggal 01 April 2024.

◦ Pembahasan

Adanya indikasi Minimarket Berjejaring Nasional (Alfamart dan Indomaret) yang diduga melanggar Peraturan Daerah (PERDA)

◦ Hasil

Jumlah minimarket berjejaring nasional (Alfamart dan Indomaret) yang ada di Kabupaten Sumbawa sampai bulan Maret 2024 terdiri dari 75 Alfamart dan 39 Indomaret. Sejak tahun 2023 atau sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan berbentuk Minimarket Berjejaring Nasional, tidak pernah ada lagi penambahan jumlah Alfamart dan Indomaret.

Semua minimarket berjejaring nasional yang telah berdiri dan masih beroperasi sampai saat ini tersebar di hampir seluruh Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa kecuali Kecamatan Orong Telu, Ropang dan Batulanteh, memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan dan sampai saat ini masih berlaku. Setiap *outlet* memperkerjakan rata-rata 5 (lima) orang tenaga kerja.

Terkait pengawasan terhadap jenis dan kualitas stok barang yang dijual termasuk standar harga menjadi pantauan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.

Terhadap ketentuan kegiatan operasional minimarket yang buka 24 jam sesuai dengan ketentuan PERDA Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dijelaskan pada pasal 32 ayat (1) jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 kecuali minimarket dapat beroperasi 24 jam.

Penerimaan daerah (PAD) dari Alfamart dan Indomaret terdiri dari pajak reklame dan pajak parkir. Pada tahun 2023 total penerimaan pajak dari Alfamart sebesar Rp 243.000.000 sedangkan dari Indomaret sebesar Rp 163.800.000., perhitungan objek pajak sesuai dengan PERDA Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Rapat Koordinasi terkait Dukungan Pihak Minimarket Berjejaring Nasional (Alfamart dan Indomaret) terhadap Pembangunan Kabupaten Sumbawa dalam Pemasaran Produk Lokal Daerah pada tanggal 07 Juni 2024 dan tanggal 13 Juni 2024.

- Pembahasan

Peran Minimarket Berjejaring Nasional (Alfamart dan Indomaret) terhadap Pembangunan Kabupaten Sumbawa.

- Hasil

Penguatan dukungan peran swasta dalam Pembangunan Kabupaten Sumbawa, dalam rangka mendukung penghargaan Adipura yang telah diperoleh dengan memperhatikan kebersihan lingkungan dan *blankspot* Kota Sumbawa perlu dukungan semua pihak. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ikut berperan penting dalam mendukung pemasaran produk lokal.

Minimnya produk lokal UMKM yang dipasarkan di Minimarket Berjejaring Nasional (Alfamart dan Indomaret), sehingga kedepannya diharapkan adanya penambahan produk lokal UMKM seperti : keripik jagung atau emping jagung binaan STR, kerupuk ikan, kopi, permen susu dll.

Produk lokal UMKM yang sudah difasilitasi oleh Indomaret dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen. Produk saat ini yang masih dipasarkan adalah Air Minum Semongkat dan Beras Premium 169

2. Rapat Koordinasi Tata Niaga Jagung Terkait Perkembangan Harga dan Distribusi Jagung di Kabupaten Sumbawa.

Menindaklanjuti laporan aduan masyarakat adanya keluhan petani jagung mengalami kesulitan pemasaran jagung karena harga yang rendah dan tidak ada pihak yang membeli.

a. “Temu Bisnis” Pengusaha Jagung Kabupaten Sumbawa pada tanggal 05 April 2024 dan tanggal 29 April 2024.

- Pembahasan

Kondisi lapangan berdasarkan laporan aduan masyarakat adanya keluhan petani jagung mengalami kesulitan pemasaran jagung karena harga yang rendah dan tidak ada pihak yang membeli.

- Hasil

Harga beli jagung oleh pengusaha saat ini kisaran harga Rp. 4.200 – Rp. 4.400 kadar air 17%, kondisi tersebut berbeda dengan bulan Februari yang sempat menyentuh harga Rp. 5.000 kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya belum memasuki panen raya sehingga harga permintaan jagung masih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada pemerintah pusat untuk melakukan revisi standar harga acuan pembelian (HAP) Jagung, sambil menunggu surat dari Asosiasi Pengusaha Jagung Sumbawa. Perhitungan dan penyesuaian HPP/HAP juga memperhatikan dampak terhadap inflasi karena kenaikan harga jagung akan diikuti kenaikan harga pakan ayam dan turunnya harga ayam ras, telur dll.

Fenomena logistik jagung di Kabupaten Sumbawa diantaranya, waktu tunggu di Pelabuhan Badas yang relatif lama, pengusaha jagung diharuskan bekerja sama dengan pengusaha truk (Asosiasi Truk) dan *shift* bongkar muat di Pelabuhan Badas yang hanya dilakukan satu kali sehari.

Untuk mengurangi tingginya biaya logistik dan distribusi pada saat panen raya jagung, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Badas untuk memprioritaskan pengiriman jagung, serta pemanfaatan tol laut.

b. Pertemuan Aliansi Persatuan Masyarakat Tani (Aliansi PERMATA) Bersama Aliansi Petani Jagung (APJ) pada tanggal 08 Mei 2024.

- Pembahasan

Menindaklanjuti aksi dan *hearing* oleh Aliansi Persatuan Masyarakat Tani (Aliansi PERMATA) Bersama Aliansi Petani Jagung (APJ)

- Hasil

Komunikasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa melalui telepon sepakat untuk :

- i. Mengagendakan pertemuan Lembaga Pemantau Pembangunan Kinerja Pemerintah (LP2KP) bersama Aliansi Petani Jagung (APJ) dengan bapak Bupati Sumbawa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024
- ii. Menghadirkan semua pengusaha jagung tanpa diwakili.
- iii. Satgas pangan segera melaksanakan pengawasan terhadap alat tester untuk menentukan kadar air (KA) jagung.

c. Rapat Pertemuan dengan Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LP2KP) dan Aliansi Petani Jagung (APJ).

◦ Pembahasan

Menindaklanjuti kesepakatan pada tanggal 08 Mei 2024 antara Sekretaris Daerah, Aliansi Petani Jagung (APJ) dan Pengusaha Jagung Kabupaten Sumbawa

◦ Hasil

Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Bupati Sumbawa) akan berkoordinasi langsung ke Kementerian Pertanian, BAPANAS, dan Bulog untuk menyampaikan kondisi permasalahan harga jagung, produksi dan stok gudang di Kabupaten Sumbawa serta alternatif solusi terkait hal tersebut.

3. Kegiatan *High Level Meeting* (HLM) TP2DD Berupa Kegiatan Sosialisasi Dan Evaluasi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan surat dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait Sosialisasi dan Evaluasi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, kegiatan melibatkan Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bank BUMN se-Kabupaten Sumbawa. Kegiatan *High Level Meeting* (HLM) TP2DD Berupa Kegiatan Sosialisasi Dan Evaluasi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada tanggal 24 Juni 2024.

◦ Pembahasan

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola keuangan pemerintah yang lebih baik serta mendorong optimalisasi pendapatan daerah. Bank Indonesia sebagai otoritas system pembayaran dan salah satu anggota Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) memiliki kewajiban untuk memastikan kelancaran dari aspek digitalisasi pembayaran di lingkungan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah.

◦ Hasil

Elektronifikasi transaksi keuangan merupakan perubahan cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai. Adanya Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Melaksanakan pemetaan stok pangan dikabupaten/kota untuk memetakan daerah surplus dan defisit stok pangan sebagai basis data penyediaan pangan sebagai dasar pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah;
- Meningkatkan Intensitas koordinasi antar instansi terkait maupun lintas sektoral pada pemenuhan ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan masyarakat;
- Perlu dilakukan operasi pasar dalam kondisi tertentu untuk barang-barang yang mengalami kenaikan harga agar terjangkau oleh masyarakat, dan perlu dilakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) pada komoditi yang stoknya berlebih dan mengalami penurunan harga (seperti gabah dan jagung). KAD dapat difasilitasi oleh Bank Indonesia, dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik yang harus diprioritaskan;
- Dinas Ketahanan Pangan memantau dan melaporkan 12 komoditas nasional dan memanfaatkan Gudang DKP melalui kemitraan dengan Bulog dalam upaya mendukung Bulog melakukan penyerapan jagung petani;
- Sinergi antara pemerintah pusat pemerintah daerah, BUMN/BUMD terhadap komoditas yang perlu mendapat perhatian lebih dalam stabilisasi harga dan kebijakan pengendalian inflasi;
- Mengintensifkan SIANDINI (Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi) melalui siandini.sumbawakab.go.id;
- Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemantauan dan pengawasan harga-harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional rutin dan di upload di website SIANDINI setiap hari Selasa dan Kamis, dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga beberapa komoditas dan Langkah antisipasi dini peringatan kondisi inflasi atau lonjakan harga.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pengembangan dan peningkatan SIANDINI;
- Pengintegrasian data menjadi Big Data dalam SIANDINI mulai dari hulu sampai konsumen untuk system pendukung Keputusan yang lebih efektif, efisien, dan komprehensif;
- Sinkronisasi data harga pangan dan ketersediaan potensi pangan masing-masing wilayah sehingga dapat menyajikan informasi terintegrasi terkait pangan baik di tingkat produsen (potan/gapoktan) sampai pedagang yang dapat bermanfaat baik oleh pemerintah sebagai bahan pengambilan Keputusan serta dapat dimanfaatkan oleh stakeholder lain maupun Masyarakat;
- Pemetaan stok pangan, distribusi dan konsumsi yang intensif melakukan sinkronisasi data antar instansi dan peningkatan koordinasi antar instansi;
- Optimalisasi Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pangan dengan dukungan digital market;
- Penguatan kapasitas petani;
- Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung arus distribusi barang dan jasa pada jalan strategis kabupaten yang rusak

berat.